

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan Nasional kita telah beberapa kali mengalami pembaharuan kurikulum, mulai dari Kurikulum 1994 sampai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau Kurikulum 2006. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum sebelumnya masih belum cukup bagus untuk menjawab tantangan kerja sekarang ini, di antaranya berkaitan dengan masalah relevansi, atau kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Sistem Pendidikan Nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik tingkat lokal, nasional maupun global.

Pemerintah menggagas tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai tindak lanjut kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. Pemerintah berharap melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini, masalah ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan segera teratasi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik (Mulyasa. 2006: 8).

Faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kurikulum adalah tenaga kependidikan/guru. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional saat ini sarat dengan tuntutan yang cukup mendasar karena harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Salah satu komponen penting dari Sistem Pendidikan Nasional adalah kurikulum karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara khususnya guru.

Pendidikan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Kurikulum merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah karena kurikulum merupakan rancangan formal dan tertulis bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah, sehingga pendidikan dapat berjalan secara terencana, sistematis, dan teratur. Kurikulum merupakan bagian penting dalam pendidikan sebab kurikulum berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pembelajaran yang pada akhirnya akan menentukan kualifikasi suatu lembaga pendidikan.

Menurut Mulyasa (2006: 9), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru karena mereka banyak dilibatkan, diharapkan mereka memiliki tanggungjawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Martinis Yamin (2007: 62), penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menekankan pada pendekatan proses dan bukan pemakaian pencapaian materi. Oleh sebab itu pembelajaran yang dilaksanakan harus melibatkan aktivitas siswa atau peserta didik, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam pembelajaran. Belajar yang dilakukan merupakan belajar bermakna dan tuntas, sehingga peserta didik betul-betul menguasai permasalahan yang dipecahkan bersama. Kemampuan dan pretasi siswa selalu dipantau dan dikontrol melalui proses evaluasi yang kontinyu.

Setelah pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006, satuan-satuan pendidikan harus mampu mengembangkan komponen-

komponen dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Komponen yang dimaksud mencakup visi, misi dan tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan, kalender pendidikan, silabus sampai pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memiliki beberapa karakteristik yang secara umum yaitu adanya partisipasi guru dan keseluruhan atau sebagian staf sekolah, adaptasi (modifikasi) dan kreasi (mendesain kurikulum baru), perpindahan tanggung jawab dari pusat, proses berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, dan ketersediaan struktur pendukung.

Pada dasarnya, tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah bagaimana membuat guru lebih aktif dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi guru juga harus aktif dalam memancing kreativitas anak didiknya sehingga dialog dua arah terjadi dengan sangat dinamis. Kelebihan lain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah memberi alokasi waktu pada kegiatan pengembangan diri siswa. Siswa tidak hanya mengenal teori tetapi terlibat dalam sebuah proses pengalaman belajar.

Kurikulum ini lahir karena adanya tuntutan perkembangan yang menghendaki desentralisasi, otonomi, dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Sistem pendidikan sentralistik telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga kemandirian dan kreativitas sekolah tidak tumbuh. Pendekatan baru berupa desentralisasi dalam pendidikan akan memberikan kewenangan yang

cukup untuk sekolah dalam mengelola mutu pendidikan peserta didik. (Slamet, 2005:3).

Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pendidikan, baik pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Selain itu desentralisasi juga dimaksudkan untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang berlebihan, mengurangi kemacetan-kemacetan jalur-jalur komunikasi, meningkatkan kemandirian, demokrasi, daya tanggap, akuntabilitas, kreativitas, inovasi, prakarsa, dan pemberdayaan dalam pengelolaan dan kepemimpinan pendidikan.

Pembuatan kurikulum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan masih dilakukan oleh pemerintah pusat dengan kurikulum standar yang berlaku secara nasional. Kemudian untuk implementasinya, sekolah dapat mengembangkan kurikulum tersebut dengan mengacu isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Namun dalam implementasi ternyata tidak sama. Hal tersebut dapat dilihat dalam penyusunan silabus. Silabus model Badan Standar Nasional Pendidikan yang seharusnya hanya sekadar menjadi model, telah menjadi acuan baku untuk dilaksanakan di seluruh penjuru tanah air. Akibatnya, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang seharusnya berbeda di setiap daerah, bahkan di setiap sekolah, namun yang terjadi justru ada penyeragaman. Selain itu kebanyakan sekolah atau guru yang tidak begitu memahami Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan juga mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan seperti kurikulum sebelumnya hanya merubah nama, format, atau silabus saja.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menjadi Kurikulum yang tetap sama produk-nya. Implementasi yang seperti inilah maka Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pun menjadi kurang efektif dalam pengembangan diri siswa karena isinya sama saja (Slamet, 2005 : 3).

Proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen. Menurut Moh. Ali (1984: 4), secara garis besar komponen tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori utama yaitu guru, materi dan siswa. Ketiganya melibatkan sarana dan prasarana meliputi metode, alat peraga, media pembelajaran, dan penataan media tempat belajar sehingga tercipta situasi dan kondisi yang memungkinkan.

Proses pembelajaran adalah proses yang terarah pada tujuan pendidikan dan pengajaran. Komponen-komponen di dalam proses pembelajaran saling berinteraksi dan berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu komponen proses belajar adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berisi diantaranya kompetensi dasar, indikator, materi standar, pengalaman belajar, metode mengajar, dan penilaian (Mulyasa, 2006: 221-222).

Guru sering kali dalam kegiatan pembelajaran di sekolah merasa bahwa pembaharuan kurikulum sebagai beban. Guru harus memahami kurikulum yang baru dan mengubah pola kerja yang biasa dilakukan guru untuk disesuaikan dengan kurikulum. Keadaan demikian merupakan akibat logis dari terlalu seringnya ada pembaharuan kurikulum. Namun kurikulum yang baik bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran.

Masih banyak faktor lain yang ikut andil terhadap kegiatan pembelajaran. Faktor kunci yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran, diantaranya mutu guru, kondisi sarana dan prasarana pendidikan, manajemen sekolah, dan sistem pendidikan nasional.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari rumpun ilmu sosial, karena itu tidak mengherankan apabila konsep-konsep atau bahan ajarnya abstrak. Bahan ajar yang abstrak menuntut keterampilan guru untuk mengorganisasikan bahan sedemikian rupa sehingga menarik dan menantang. Meskipun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan telah dilaksanakan, namun terdapat indikasi bahwa ada kecenderungan guru untuk menggunakan teknik mengajar tradisional, seperti ceramah dan tanya jawab. Padahal teknik ini kurang dapat memobilisasi dan menumbuhkembangkan potensi berpikir, sikap, dan keterampilan siswa.

Di samping itu menimbulkan perasaan bosan dan pasif sehingga siswa menganggap mudah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini bertugas mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengembang 3 fungsi pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligensi*), membina tanggung jawab (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*) (Udin S. Winataputra. 2005: 1.1). Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dipelajari siswa sebagai warga negara.

Adanya perubahan baik kurikulum, pengembangan silabus, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, maka dalam pelaksanaannya tentu akan mengalami suatu hambatan. Mulai dari apakah guru tersebut bisa menyusun dan menguasai kurikulum. Kemudian apakah guru tersebut dapat menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan strategi belajar-mengajar, mengembangkan dan memilih media pembelajaraan, dan merencanakan dan melakukan evaluasi terutama untuk ranah kognitif.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu perkiraan atau proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh guru maupun peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan membentuk kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2009: 153).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 dinyatakan bahwa:

”Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”.

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses menjelaskan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Menurut Mulyasa (2006: 255) pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi didalam interaksi tersebut, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan.

Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dari peserta didik. Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mencakup tiga hal, yaitu *pre tes* (tes awal), pembentukan kompetensi, dan *post tes*.

Berdasarkan pengalaman peneliti ternyata pengetahuan tentang bagaimana pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran sangat diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan masih banyak guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang belum secara maksimal dapat mengembangkan kompetensi yang ada di dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Banyak guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang pada saat memberi materi/menyampaikan materi kepada peserta didik, cara penyajiannya masih kurang membangkitkan semangat peserta didik untuk

belajar secara aktif dan mandiri. Bahkan ada beberapa guru yang masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam mengajar di kelas.

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan siswanya. Di mana setiap sekolah dalam pengembangannya berbeda-beda. Tetapi pada kenyataannya terjadi penyeragaman. Format contoh pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran digunakan sebagai acuan yang baku bagi Guru. Padahal format contoh tersebut masih harus dikembangkan lagi.

Adanya kesenjangan informasi antar daerah, keragaman kompetensi guru atau sarana-prasarana sekolah menjadi cacat utama dalam melaksanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menemui hambatan dari segi Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Tidak banyak Sumber Daya Manusia yang mampu menjabarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di dalam satuan pendidikan. Guru belum sepenuhnya memahami Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan secara utuh, baik dari segi konsep maupun penerapannya di lapangan. Padahal pengimplemetasian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tersebut mutlak diperlukan demi tercapainya target pengajaran yakni penguasaan materi dengan baik oleh peserta didik.

Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah yaitu tingkat provinsi yang kemudian disosialisasikan ke sekolah-sekolah.

Sosialisasi ke sekolah-sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing. Namun kondisi geografis tanah air kita yang beragam membuat kurangnya sosialisasi sampai ke seluruh pelosok tanah air. Sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil mendapatkan informasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan hanya dari mulut ke mulut saja. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan banyak sekolah yang masih simpang-siur dalam memahami Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan meski telah diterapkan selama 6 tahun.

Selain itu masalah yang tidak kalah penting adalah segi sarana dan prasarana. Kebanyakan sekolah dinilai kekurangan sarana untuk mendukung kelengkapan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hal ini terutama dialami oleh sekolah yang berada di daerah terpencil dan sekolah-sekolah yang memiliki masalah kesulitan dana. Masalah tersebut sangat mempengaruhi pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah yang berdampak pada kurang efektifnya penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Permasalahan tersebut juga dialami oleh SMA-SMA yang berada di Kabupaten Sleman khususnya Kabupaten Sleman wilayah Barat. Masih banyak guru yang belum optimal dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pebelajaran karena kurangnya sarana dan prasana.

SMA di Kabupaten Sleman Wilayah Barat merupakan SMA yang berada di daerah pinggiran kota. Guru-guru yang ada di daerah pinggiran kota memiliki indikasi yang besar dalam mengalami hambatan pada

pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa guru-guru se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat belum melakukan upaya dalam mengatasi suatu hambatan. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya diberlakukan penelitian tentang apakah hambatan-hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat, di mana Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sudah diterapkan di sekolah, namun kurikulum tersebut belum terlaksana dengan sempurna dan masih menemui beberapa hambatan. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah masih terdapat berbagai hambatan khususnya di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat karena itu perlu dilakukan suatu penelitian.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan terkait dengan hambatan apa saja yang dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai berikut :

1. Belum sempurnanya pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

2. Belum optimalnya guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah-sekolah.
3. Kurangnya sarana prasarana sebagai kelengkapan dari pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terutama sarana prasarana dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat.
4. Masih adanya hambatan yang dialami oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan silabus.
5. Masih adanya hambatan yang dialami oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
6. Masih adanya hambatan yang dialami oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam pelaksanaan pembelajaran.
7. Masih belum diketahuinya upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

### C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang timbul sehubungan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, maka dari uraian masalah yang berhasil diidentifikasi di atas, maka peneltian ini dibatasi pada :

1. Hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ?

## **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang sejenis di masa yang akan datang.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk/terhadap konsep pembelajaran dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk diteliti lebih lanjut baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan pada khususnya dan guru mata pelajaran lainnya pada umumnya, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran, khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah atau organisasi profesi guru untuk mengatasi berbagai permasalahan sarana kritis bagi terselenggaranya sistem pendidikan yang berpengaruh pada perbaikan kualitas pendidikan Indonesia.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama atau masalah lain yang berkaitan.

## G. Batasan Istilah

1. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Menurut Chollisin (2000: 19), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga Negara

yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar mengajar. Dalam proses ini karakter ilmu politik sangat berpengaruh secara dominan baik dalam mengembangkan materi maupun strategi pengajarannya.

3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah (Mulyasa, 2006: 19). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, kalender pendidikan dan silabus.
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu perkiraan atau proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh guru maupun peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan membentuk kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2009: 153).
5. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik (Mulyasa. 2006: 255).